

Optimalisasi Fungsi Brimob Melalui Capacity Building bagi Anggota yang Menjalani Penugasan dalam Operasi Kewilayahan Polri

Gefri Agitia

Sekolah Kajian Strategik Global Universitas Indonesia

Program Kajian Ilmu Kepolisian

gefribrimob@gmail.com

Basir

Sekolah Kajian Strategik Global Universitas Indonesia

Program Kajian Ilmu Kepolisian

basirsagena@gmail.com

Riska Sri Handayani

Sekolah Kajian Strategik Global Universitas Indonesia

Program Kajian Ilmu Kepolisian

riska.sri@ui.ac.id

Abstrak

Optimalisasi fungsi Brimob (Brigade Mobil) melalui *Capacity Building* bagi anggota yang menjalani penugasan dalam operasi kewilayahan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok Brimob. *Capacity Building* ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap anggota Brimob dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi di lapangan, khususnya dalam operasi kewilayahan POLRI. Tugas Polri dalam mengupayakan keamanan dan ketertiban bertambah berat manakala anggota Polri harus menangani target operasi yang wilayah atau daerahnya mengalami gejala atau konflik. Masih ada sejumlah tempat yang rawan perang di Indonesia, termasuk Papua, Ambon, dan Poso, serta daerah-daerah lain yang memiliki risiko tinggi terhadap kerusuhan dan konflik. Anggota Brimob sering diperbantukan dan dikirim ke daerah konflik mengingat Brimob adalah unsur pelaksana utama Polri yang memiliki kemampuan untuk menanggulangi gangguan Kantibmas berkadar tinggi, sebagian besar kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata dan/atau bahan peledak. Fungsi dan peran Brimob yang menjalani penugasan dalam Bantuan Kendali Operasi (BKO) di wilayah operasi telah dijalankan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dalam upaya untuk mengidentifikasi solusi untuk isu-isu hukum saat ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, agar penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah konflik berhasil, fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM) dan fungsi manajerial dalam aspek perencanaan harus diperkuat ketika melakukan penugasan *business as usual* (BKO) ke

daerah konflik. Manfaat Capacity Building bagi anggota Brimob dalam operasi kewilayahan POLRI ini penting, termasuk di dalamnya pelatihan fisik, mental, dan taktik.

Kata Kunci brimob, *capacity building*, operasi kewilayahan, POLRI, pengetahuan, keterampilan, sikap, pelatihan fisik, mental, taktik

I. PENDAHULUAN

Tanggung jawab utama polisi diuraikan pada Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab ini termasuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, melindungi dan membantu masyarakat umum, dan menegakkan hukum dan ketertiban. Selain itu, Polri juga bertanggung jawab untuk merencanakan semua kegiatan yang menjamin terselenggaranya lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar, seperti yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1). Untuk itu, Polri perlu melakukan penyidikan tindak pidana serta meningkatkan peran serta dan kesadaran hukum masyarakat sejalan dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, di samping memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Polri juga bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai tugas dan mendukung pembelaan HAM seimbang dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab Polri juga diuraikan dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan misi pertahanan dan keamanan formal. (Poerbopranoto, 1978) Fungsi ini berfungsi sebagai contoh tren demokratisasi dalam pengelolaan urusan publik. Sangat penting untuk menekankan bahwa tidak ada hirarki atau urutan kepentingan di antara tiga tugas utama polisi; sebaliknya, setiap tugas dianggap sama pentingnya (Kelana, 2002)

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang adalah untuk menjamin agar roda pemerintahan dan seluruh kegiatan masyarakat berjalan dengan baik dan normal, dipatuhinya hukum dan pelaksanaan hak asasi manusia (HAM), serta terbebasnya masyarakat dari gejolak sosial, rasa takut, dan khawatir. Masih ada sejumlah tempat yang rawan perang di Indonesia, termasuk Papua, Ambon, dan Poso, serta daerah-daerah lain yang memiliki risiko tinggi terhadap kerusuhan dan konflik. Gangguan atau ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat meningkat. Tidak hanya masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik tersebut tetapi juga anggota polisi dan aparat TNI. Pada kondisi daerah konflik, gangguan keamanan dan ketertiban menjadi berlipat tingkat kesulitannya dalam pelaksanaan manajemen operasional kepolisian. Sehingga tidak heran dalam kondisi daerah yang berkonflik, satuan Brimob yang seringkali diterjunkan untuk diperbantukan atau BKO (Bawah Kendali Operasi) untuk mengamankan daerah-daerah konflik. (Anggoro, 2006)

Anggota Brimob sering diperbantukan dan dikirim ke daerah konflik mengingat Brimob adalah unsur pelaksana utama Polri yang memiliki kemampuan untuk menanggulangi gangguan Kantibmas berkadar tinggi, sebagian besar kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata dan/atau bahan peledak. Bantuan taktis yang sering dilakukan adalah upaya penanggulangan huru-hara, kerusuhan massa, sabotase,

terror, jihandak, pengamanan VIP (*Very Important Person*) dan VVIP (*Very Very Important Person*), SAR (*search and rescue*), dan penindakan terhadap gerakan separatis bersenjata dan kejahatan dengan intensitas tinggi. Brimob yang merupakan satuan pelaksana tingkat pusat yang berada pada Markas Besar Polri dan secara langsung berada dibawah komando dan pengendalian Kapolri. Sebagai unsur pelaksana tingkat pusat, operasionalisasi personel Brimob mencakup wilayah yurisdiksi nasional dalam rangka membantu Polda sebagai kesatuan induk penuh.

Dalam melaksanakan tugas operasi kepolisian, Brimob berperan sebagai *back up* satuan kewilayahan, pemberian bantuan kekuatan, komando dan pengendalian berada kesatuan wilayah sebagai pengguna. Pada kegiatan kepolisian, personel Brimob diarahkan pada sasaran kegiatan rutin dalam rangka persiapan dan peningkatan kemampuan menangani jihandak, huru hara, pencarian dan penyelamatan dan kemampuan mengatasi teror. Sedangkan pada operasi kepolisian dilaksanakan dalam bentuk pola operasi kewilayahan yakni berperan serta dalam operasi kepolisian terhadap bentuk-bentuk gangguan Kantibmas yang meresahkan masyarakat terutama kontijensi yang bersifat lokal di wilayah dan operasi kewilayahan secara terpusat khususnya terhadap ancaman yang berskala nasional maupun internasional.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa tugas yang dijalankan personel Brimob yang menjalani penugasan operasi atau BKO ke daerah konflik sangat berat. Beban kerja yang tinggi akan sangat tergantung pada kemampuan dan keterampilan personel dalam mengatasi permasalahan konflik di daerah, kondisi fisik, usia, dan masa kerja personel. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi personel Brimob dalam menjalankan penugasan operasi atau BKO ke daerah konflik maka dibutuhkan penguatan fungsi manajerial pada aspek perencanaan dan di dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM), fungsi operasional guna mendukung keberhasilan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah konflik. Hasibuan (S.P, 2003) menyatakan bahwa fungsi manajerial dalam aspek perencanaan dan fungsi operasional antara lain mencakup proses seleksi atau rekrutmen, pengembangan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis, kompensasi berupa balas jasa baik langsung ataupun tidak langsung, pemeliharaan untuk meningkatkan kondisi fisik dan mental/ psikologis, serta kedisiplinan. *Capacity Building* ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap anggota Brimob dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi di lapangan, khususnya dalam operasi kewilayahan POLRI.

II. LANDASAN TEORI

a. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian adalah bagian dari manajemen umum. Salah satu bagiannya adalah manajemen sumber daya manusia yang merupakan aspek penting karena semakin pentingnya sumber daya manusia dalam mencapai target organisasi dan juga merupakan bagian dari manajemen umum. Ini adalah sintesis metodis dari berbagai pengalaman dan penemuan penelitian terkait SDM. “Manajemen” mengacu pada tubuh pengetahuan dalam MSDM. (Rivai, 2006) Menurut Douglas dan James (1986), Proses untuk mencapai hasil terbaik bagi individu,

pekerjaan mereka, organisasi, dan lingkungan mereka-semua sambil membantu yang terakhir mewujudkan tujuannya dan yang pertama mencapai tingkat efisiensi dan kualitas output yang diinginkan-dikenal sebagai MSDM.

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah proses mengatur, mengorganisir, memimpin, dan mengelola perekrutan, serta mengembangkan, memberi penghargaan, mengintegrasikan, mempertahankan, dan memutuskan hubungan kerja, menurut Flippo dan dialihbahasakan oleh Moh. Masud. Mencapai tujuan-tujuan masyarakat, organisasi, dan pribadi adalah tujuannya. (Douglas & G, 1986).

b. Fungsi Manajemen SDM

Menurut Zainal (Rivai, 2006), Administratif dan operasional adalah dua bagian yang berbeda dari MSDM. Konsep manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan mencakup semua aspek pengorganisasian, pengelolaan, perencanaan, dan pengawasan tugas-tugas manajerial yang berkorelasi pada manajemen sumber daya manusia. (Hasibuan, 2003)

c. Kendali Operasi (BKO)

Bawah Kendali Operasi atau BKO adalah salah satu bentuk penugasan kepada anggota Polri untuk diperbantukan ke satuan polisi lainnya yang tidak dapat menjalankan fungsi mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Anggota Polri yang sering mendapat tugas perbantuan adalah anggota Brimob. Anggota Brimob yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan keamanan berintensitas tinggi selalu mendapat tugas perbantuan atau dikirim untuk membantu mengamankan wilayah yang mengalami konflik atau bencana. Dalam istilah yang lebih populer dikenal dengan istilah di-BKO-kan ke wilayah Papua, artinya anggota Polri yang mendapat tugas untuk membantu mengamankan konflik di Papua.

d. Capacity Building

Merilee S. Grindle (1997) menyebutkan *capacity building* merupakan upaya mengembangkan rencana untuk meningkatkan efektivitas, daya tanggap, dan efisiensi kinerja pemerintah. (Grindle, 1997) Dalam konteks tulisan ini adalah kemampuan dari personel Brimob menghadapi berbagai situasi dan kondisi di lapangan, khususnya dalam operasi kewilayahan POLRI.

Seperti yang dikatakan Dale, *capacity building* adalah tentang memberikan orang-orang dengan kemampuan kognitif dan keterampilan tertentu alat yang mereka butuhkan untuk diberdayakan. Selain itu, hal ini juga memastikan bahwa kompetensi anggota atau staf akan tetap bertahan di masa depan. Hal ini membutuhkan keterlibatan aktif (partisipasi) sehubungan dengan sumber daya atau atribut tertentu yang mungkin perlu diberikan secara langsung oleh orang atau organisasi lain. (Dale, 2004)

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menjelaskan pola-pola yang diakui secara luas yang

diperiksa melalui penerapan teori-teori obyektif, metode kualitatif memeriksa fenomena sosial dan budaya dari kelompok yang bersangkutan (Suparlan, 2024). Penelitian ini menuntut peneliti untuk memiliki strategi penelitian dan keterampilan untuk memperoleh data.

Lexy Moleong mencirikan penelitian kualitatif sebagai metode investigasi yang menghasilkan data deskriptif yang dapat diamati. Strategi ini berfokus pada individu dan holistik. (Moleong, 2014) Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi dan gejala yang sudah ada sebelumnya, khususnya yang dipahami oleh responden survei. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dapat mengungkapkan fenomena yang terkait dengan subjek yang membutuhkan lebih banyak studi. (Arikunto, 2010)

Jenis penelitian kualitatif ini melibatkan analisis data di bawah kondisi dunia yang sebenarnya. Data dan pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian (lapangan) dicatat sebagai bagian dari proses survei. Penelitian lapangan mengacu pada penelitian yang dilakukan di lokasi tertentu atau lokasi yang dipilih untuk menyelidiki atau menginvestigasi apa pun yang terjadi di lokasi tersebut. (Moleong, 2014)

Data primer mengacu pada semua informasi yang termasuk dalam penelitian ini yang diperoleh secara langsung selama wawancara dengan narasumber. Mayoritas data primer terdiri dari pernyataan yang dibuat oleh subjek penelitian, yang juga dikenal sebagai informan penelitian. Pernyataan-pernyataan ini biasanya dibuat bersamaan dengan ekspresi, gerak tubuh, gerakan, nada, dan perilaku yang dapat diandalkan terkait dengan masalah yang diteliti. Sebaliknya, setiap penjelasan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah berasal dari sumber tertulis, termasuk jurnal, buku, dan publikasi ilmiah, disebut sebagai data sekunder. dan bahan lain yang berhubungan dengan inti bahasan yang sedang diselidiki. Yang menjadi data sekunder adalah UU Kepolisian Nomor 2/ 2002, Perkap Nomor 6/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Data Operasi Madago Raya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Fungsi dan peran Brimob yang menjalani penugasan dalam Bantuan Kendali Operasi (BKO) di wilayah operasi telah dijalankan secara optimal

Operasi Tinombala (sekarang dikenal sebagai Operasi Madago Raya) diluncurkan pada tahun 2016. Operasi ini merupakan operasi gabungan TNI dan Polri. Operasi Tinombala bertujuan untuk menghancurkan organisasi teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah. Di antara tindakan kekerasan yang dilakukan oleh MIT yang menyebabkan operasi tersebut adalah pembunuhan warga sipil dan anggota layanan keamanan, serta pencurian. Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia berkolaborasi dalam operasi ini dengan tujuan untuk menangkap dan mungkin memenggal kepala para anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT), sebuah organisasi teroris di Indonesia yang dipimpin oleh Santoso dan mendukung ISIS. Santoso dibunuh pada tahun 2016 oleh TNI dan Polri. Namun, operasi tersebut dilanjutkan oleh Kapolri Tito Karnavian untuk mengamankan wilayah tersebut dari anggota kelompok yang tersisa. (Gabrillin, 2016)

Hampir sepuluh tahun telah berlalu sejak operasi ini dimulai, ketika masih bernama Operasi Tinombala. Operasi Madago Raya adalah nama baru yang digunakan setelah fokusnya bergeser dari penyelesaian konflik menjadi penanggulangan ekstremisme. Tujuan dari Operasi Madago Raya telah dialihkan menjadi pencegahan, penangkalan, dan penindakan, karena Kabupaten Poso merupakan wilayah target kelompok radikal. Banyak orang, baik secara aktif maupun pasif, berempati kepada para DPO dan mungkin akan melakukan serangan teroris jika diberi kesempatan. Tujuan dari Operasi Madago Raya adalah untuk menghentikan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dengan melembagakan langkah-langkah untuk melakukan hal tersebut peristiwa negatif. Tindakan pencegahan adalah proses untuk memastikan bahwa suatu pelanggaran norma-norma sosial tidak terjadi dalam lingkup sosial. *the act To ensure that individuals are more compliant with the regulations and understand the potential consequences of their actions, preventive measures are implemented.* Anggota Brimob Polda Sulteng yang ditempatkan di daerah rawan radikalisasi memberikan bantuan kepada Satgas Pencegahan yang dikepalai oleh Komandan Satuan Brimob Polda Sulteng. Ada total dua belas posisi dalam Satgas Pencegahan, yang dibagi secara merata di Sektor Parimo dan Poso Pesisir.

Sebanyak 250 personel dari unsur intelijen, preemtif, preventif, dan perbantuan turut serta dalam Operasi Madago Raya Tahap II. Personel tersebut disebar di wilayah Poso, Parigi Moutong, Sigi, dan Touna dalam beberapa tim. Bersama dengan TNI dan instansi terkait lainnya, Polda Sulteng akan melaksanakan operasi ini. Provinsi Sulawesi Tengah mengadopsi strategi keamanan yang mencakup inisiatif deradikalisasi dan kontra-radikalisis untuk menciptakan lingkungan kamtibmas yang aman dan kondusif.

Brigade Mobile (Brimob) Polri, khususnya Resimen II Pas Pelopor Korbrimob Polri, memainkan peran penting dalam Operasi Madago Raya II. Kemampuan dan keahlian Brimob dalam operasi kontra-terorisme sangat dibutuhkan untuk menumpas kelompok MIT. Dengan terus meningkatkan kemampuan dan mengatasi berbagai tantangan yang ada, diharapkan Brimob dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencapai tujuan Operasi Madago Raya II yaitu menciptakan keamanan dan stabilitas di Sulawesi Tengah.

Karyawan yang bertanggung jawab harus mahir dengan instrumen ini dan mengetahui penggunaan dan spesifikasinya. Anggota dan staf juga harus mampu memelihara dan merawat berbagai peralatan. Untuk memungkinkan pelayanan yang prima, diperlukan juga infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya. Karena memudahkan kinerja logistik di lingkungan Brimob, maka fasilitas ini menjadi salah satu kebutuhan di bidang logistik. Fasilitas ini memudahkan dalam menerapkan pembinaan dan memanfaatkan setiap aspek kekuatan organisasi.

Menurut pengamatan penulis, tanggung jawab utama tim lapangan Pasukan Pelopor Resimen II adalah merencanakan dan menyiapkan urusan logistik, merencanakan kebutuhan perbekalan umum anggota lainnya, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan rencana kerja, menilai standarisasi kuantitas dan kualitas materiil, dan melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rencana kerja sebagai bahan masukan untuk menyusun kebijakan logistik tambahan. Adapun

tugas-tugas terkait lainnya adalah mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta mengarahkan kekuatan satuan sesuai dengan arahan Komandan Korps Brimob.

Secara umum, peningkatan kapabilitas mengacu pada serangkaian prosedur atau tindakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas individu. Namun, definisi lain dari kapabilitas adalah “kemampuan untuk melaksanakan tujuan yang telah ditentukan.” Kapabilitas memiliki banyak segi dan berkembang secara progresif. Gagasan di balik peningkatan kapabilitas adalah bahwa peningkatan kinerja dan kapabilitas berjalan seiring. Sayangnya, ada tiga faktor yang menyulitkan pengukuran kapabilitas: 1) kurangnya pengetahuan umum tentang sifat hubungan antara kapabilitas dan kinerja; 2) definisi yang tidak konsisten tentang apa yang dianggap sebagai kinerja yang “memadai”; dan 3) dampak lingkungan eksternal terhadap kapabilitas dan kinerja. (Brown & Duguid, 2001)

Dalam manajemen sumber daya manusia, menurut Douglas dan James prosesnya adalah menemukan titik temu di mana karyawan, pekerjaan organisasi, dan lingkungannya bertemu. (Douglas & G, 1986) Dengan cara ini, kedua belah pihak dapat merasa bahagia dan produktif, dan perusahaan dapat mencapai tujuannya. maka apa yang dilakukan dalam Operasi Madago Raya ini sumber daya manusia merupakan personil dari Resimen II Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, yang melakukan operasi khusus tersebut untuk mencapai keinginan organisasi. Operasi di Poso bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Provinsi Sulawesi Tengah, menciptakan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) yang kondusif.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pelibatan kekuatan pada pelaksanaan Operasi Madago Raya yang berlangsung pada tahun 2021 berjumlah 1.019 (seribu sembilan belas) personil, yang terdiri dari 470 (empat ratus tujuh puluh) personil Polda Sulteng, 169 personil Backup Mabes Polri dan 380 personil BKO TNI. Personil tersebut kemudian dimasukkan dalam 5 satgas/subsatgas antara lain Satgas 1 Intelijen, Satgas 2 Prentif, Satgas 3 Penindakan, Satgas 4 Gakum dan Satgas 5 Bantuan, meliputi wilayah Operasi Kabupaten Poso dan sekitarnya, Kabupaten Parimo dan sekitarnya, dan Kabupaten Sigi dan sekitarnya.

Manajemen sumber daya manusia mencakup tugas-tugas berikut, menurut deskripsi dan temuan informan penelitian: mengorganisir, merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan proses perekrutan; mengembangkan, memberi kompensasi, mengintegrasikan, memelihara, dan mengabaikan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan kolektif, pribadi, dan organisasi. Sebagai bagian dari penelitian ini, sumber daya manusia yakni personel Resimen II Pasukan Pelopor Korbrimob Polri pada Operasi Madago Raya dimana dalam operasi tersebut sudah direncanakan dan juga dilakukan pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian terhadap personil yang terlibat.

Dari hasil wawancara dengan informan penelitian, maka manajemen operasional George Terry dan fungsi operasional SDM dalam Satgassus Operasi Madago Raya saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan operasi penumpasan kelompok MIT. (Terry, 1964) Dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi

tersebut, Satgassus Operasi Madago Raya dapat meningkatkan efektivitas operasi dan mencapai tujuannya dengan optimal.

Manajemen operasional yang efektif dari Polri dan Brimob sangat penting untuk keberhasilan Operasi Madago Raya. Dengan terus meningkatkan kemampuan dan strategi, serta mengatasi berbagai tantangan yang ada, diharapkan operasi ini dapat mencapai tujuannya untuk menumpas kelompok MIT dan menciptakan keamanan di Sulawesi Tengah.

Jika dikaitkan dengan Kendali Operasi (BKO) dalam Operasi Madago Raya mengacu pada struktur komando dan koordinasi yang mengatur pelaksanaan operasi penumpasan kelompok Mujahideen Indonesia Timur (MIT) di Sulawesi Tengah. BKO yang efektif sangat penting untuk memastikan kelancaran, efisiensi, dan efektivitas operasi.

Dari hasil wawancara dengan informan penelitian, bahwa BKO yang efektif memainkan peran penting dalam keberhasilan Operasi Madago Raya. Dengan terus meningkatkan kemampuan koordinasi, komunikasi, dan pemanfaatan teknologi, diharapkan BKO dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan operasi penumpasan kelompok MIT dan menciptakan keamanan di Sulawesi Tengah. Bahwa struktur BKO dalam Operasi Madago Raya dapat berubah seiring dengan perkembangan operasi dan kebutuhan yang ada. Jika dikaitkan dengan teori gunung es kepolisian proaktif, maka terdapat tiga strategi yang dilakukan oleh Resimen II Pasukan Pelopor Korbrimob Polri dalam melakukan strategi, yakni strategi kepolisian deteksi dan pencegahan dini, strategi pencegahan, dan strategi represif.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lokasi, sasaran pelaksanaan patroli dialogis berada di wilayah pos, atau dengan kata lain patroli di ring 1 dari pos. Patroli dialogis dilaksanakan dengan tujuan pengamanan daerah di sekitaran pos, pengamanan yang dimaksud yaitu:

1. Personel mengamati situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Personel memberikan kesadaran masyarakat bahwa kehadiran pasukan ditengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi tindakan preemtif dalam pencegahan sejak dini akan tindak kejahatan.
3. Personel memberikan kenyamanan masyarakat akan situasi yang memungkinkan kelompok MIT atau terror lain melaksanakan tindak kejahatannya.

Patroli dialogis dilaksanakan oleh beberapa orang personel ini, dipimpin oleh satu perwira pertama atau dalam struktural satgas sebagai komandan tim. Sebelum melaksanakan patroli, tugas seorang dantim memberikan arahan terhadap personel yang akan melaksanakan patroli dialogis, yakni:

1. Sasaran atau target patroli.
2. Jarak tempuh kesasaran.
3. Estimasi waktu ke sasaran.
4. Pengamanan daerah sekitaran sasaran.
5. Sasaran materi dan informasi

Dalam pergerakan patroli dialogis pasukan wajib menyapa ataupun berkomunikasi dengan masyarakat sekitar yang ada, Agar masyarakat dan staf dapat berkolaborasi dalam mengamankan wilayah tersebut, diharapkan akan terbangun

hubungan yang positif dengan mereka. Sesampainya di sasaran pasukan sudah ditempatkan sesuai dengan tugas masing-masing, ada yang mengamankan area, ada yang melaksanakan komunikasi dengan sasaran, ada yang melaksanakan dokumentasi sebagai bentuk bukti nyata dalam pelaporan kegiatan satuan tugas.

b. *Capacity Building* sebagai upaya mengoptimalkan fungsi dan peran Brimob yang menjalani penugasan dalam Bantuan Kendali Operasi di wilayah operasi

Dalam tulisan ini menganalisis apa yang diutarakan oleh Merilee S. Grindle *capacity building* dalam konteks Brimob yang menjalani penugasan dalam Bantuan Kendali Operasi (BKO) di wilayah operasi, *Capacity Building* memiliki beberapa implikasi penting, yakni merupakan alat yang penting untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme Brimob dalam pelaksanaan tugas pokoknya, khususnya dalam konteks BKO di wilayah operasi. Berdasarkan definisi *Capacity Building* oleh Merilee S. Grindle, beberapa poin penting dapat dianalisis dalam konteks Brimob yang menjalani penugasan dalam BKO: fokus pada Tugas Pokok, berkelanjutan dimana *Capacity Building* haruslah proses yang berkelanjutan, tidak hanya sebatas pelatihan atau transfer pengetahuan, lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan perubahan, *Capacity Building* harus melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang berkepentingan, termasuk anggota Brimob, pimpinan Brimob, dan pemangku kepentingan lainnya dan *Capacity Building* harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip *Capacity Building* yang dipaparkan oleh Merilee S. Grindle, Brimob dapat meningkatkan efektivitas dan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugas pokoknya, khususnya dalam konteks BKO di wilayah operasi.

Jika menganalisis *capacity building* menurut Dale, maka beberapa poin penting dapat dilihat dalam konteks Brimob yang menjalani penugasan dalam BKO, yakni pendekatan Sistem bahwa *Capacity Building* harus dilakukan dengan pendekatan sistem yang mempertimbangkan semua aspek organisasi Brimob, termasuk sistem dan struktur, sumber daya manusia, budaya organisasi, dan teknologi, *Capacity Building* harus melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang berkepentingan, termasuk anggota Brimob, pimpinan Brimob, pemangku kepentingan internal lainnya, dan pemangku kepentingan eksternal, *Capacity Building* harus berfokus pada pengembangan sistem dan struktur yang mendukung pembelajaran dan perubahan yang berkelanjutan, *Capacity Building* harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, dan *Capacity Building* harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan organisasi Brimob dalam jangka panjang.

Dalam konteks Brimob yang menjalani penugasan dalam Bantuan Kendali Operasi (BKO) di wilayah operasi, *Capacity Building* memiliki beberapa implikasi penting:

1. Peningkatan Kemampuan Organisasi Brimob

Capacity Building dapat membantu Brimob untuk meningkatkan kemampuan organisasinya dalam menjalankan tugas pokoknya. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan sistem dan struktur yang mendukung pembelajaran dan perubahan.

2. Peningkatan Kemampuan Individu Anggota Brimob

Capacity Building dapat membantu Brimob untuk meningkatkan kapasitas setiap orang dalam menyelesaikan tugas. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan dan pengembangan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap anggota Brimob.

3. Peningkatan Kinerja Brimob dalam BKO

Capacity Building dapat membantu Brimob untuk meningkatkan kinerjanya dalam BKO. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan sistem dan struktur yang mendukung koordinasi dan kerjasama antar satuan Brimob dan dengan satuan lain dalam operasi kewilayahan POLRI.

4. Peningkatan Akuntabilitas Brimob

Capacity Building dapat membantu Brimob untuk meningkatkan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan sistem dan struktur yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

5. Peningkatan Keberlanjutan Brimob

Capacity Building dapat membantu Brimob untuk meningkatkan keberlanjutan jangka panjang. Penciptaan struktur dan proses yang mendorong pembelajaran dan perubahan yang berkelanjutan dapat membantu mencapai hal ini.

Capacity Building (peningkatan kapasitas) adalah proses yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kemampuan organisasi dan individu dalam mencapai tujuan mereka secara efektif. Dalam konteks Brimob yang menjalani penugasan dalam BKO, *Capacity Building* dapat menjadi upaya strategis untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya.

Adapun manfaat *Capacity Building* bagi Brimob dalam BKO:

1. Meningkatkan kemampuan Brimob dalam melaksanakan tugas pokoknya, seperti penanggulangan terorisme, penyelamatan sandera, dan penegakan hukum.
2. Meningkatkan kemampuan Brimob dalam beradaptasi dengan situasi dan kondisi di lapangan, yang berbeda-beda di setiap wilayah operasi.
3. Meningkatkan kemampuan Brimob dalam bekerja sama dengan satuan lain dalam operasi kewilayahan POLRI.
4. Meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi Brimob dalam melaksanakan tugas.
5. Meningkatkan citra positif Brimob di mata masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di dapat bahwa bentuk-bentuk *Capacity Building* bagi Brimob dalam BKO adalah seperti pelatihan fisik, mental, dan taktik untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap anggota Brimob, simulasi dan latihan yang dirancang untuk mencerminkan situasi dan kondisi di wilayah operasi, program untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan anggota Brimob, program untuk meningkatkan hubungan Brimob dengan masyarakat di wilayah operasi dan evaluasi dan monitoring untuk memastikan efektivitas program *Capacity Building*.

Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan Capacity Building bagi Brimob dalam BKO:

1. Kebutuhan dan tujuan: *Capacity Building* harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan Brimob dalam BKO.
2. Sumber daya: *Capacity Building* harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, seperti anggaran, waktu, dan personel.
3. Keterlibatan pemangku kepentingan: *Capacity Building* harus melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang berkepentingan, termasuk anggota Brimob, pimpinan Brimob, dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Evaluasi dan monitoring: *Capacity Building* harus dievaluasi dan dimonitor secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Capacity Building merupakan investasi penting untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme Brimob dalam BKO. Dengan melaksanakan Capacity Building secara efektif, Brimob dapat mendukung upaya Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

V. KESIMPULAN

Operasi Kewilayahan POLRI adalah operasi yang dilaksanakan oleh satuan-satuan operasional POLRI di wilayah kerjanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Operasi Kewilayahan POLRI meliputi berbagai kegiatan, seperti patroli, razia, pengamanan kegiatan masyarakat, dan penegakan hukum. Guna optimalisasi operasi kewilayahan, Personel Resimen II Pasukan Pelopor Polri dianggap sebagai elemen penting sumber daya manusia perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui capacity building.

Capacity Building merupakan upaya yang penting untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Brimob dalam Operasi Kewilayahan POLRI. Dengan melaksanakan Capacity Building secara efektif, Brimob dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan membangun citra positif di mata masyarakat.

Capacity Building merupakan investasi penting untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme Brimob dalam Operasi Kewilayahan POLRI. Dengan melaksanakan Capacity Building secara efektif, Brimob dapat berkontribusi secara optimal dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, A. (2006). Analisis Implementasi Manajemen Operasional Markas Komando Korps Brimob Polri Dalam Rangka Penugasan Satuan I Gegana ke Daerah Konflik. *Skripsi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian*.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brown, J., & Duguid, P. (2001). Knowledge and organization: A social-practice perspective. *Organization science*, 198-213.
- Dale, R. (2004). *Evaluating Development Programmes and Projects*. Sage.

-
- Douglas, H. T., & G, J. G. (1986). *Human Resources Management, Strategy, Design and Implementation*. Glenview: Scoot Foresman and Company.
- Gabrillin, A. (2016, January 2). *PT. Kompas Cyber Media*. Retrieved from Kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2016/01/02/15024251/Polri.Targetkan.Tangkap.Kelompok.Santoso.Sebelum.Operasi.Camar.Maleo.Berakhir>
- Grindle, M. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*. Boston: Harvard Institute for International Development.
- Hall T Douglas, J. G. (1986). *Human Resources Management, Strategy, Design and Implementation*. Glenview: Scoot Foresman and Company.
- Kelana, M. (2002). *Memahami Undang-undang Kepolisian: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*. Jakarta: PTIK Press.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Poerbopranoto, K. (1978). *Sedikit tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Jakarta-Bandung: Eresco.
- Rivai, V. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori Ke Praktik* (Vol. 1). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S.P, M. H. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suparlan, P. (2004). *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Terry, G. R. (1964). *Principles of Management*. Illions: Richard Irwin.